

Pemuda dalam Cengkeraman Kekuasaan: dari Seinendan ke Generasi Milenial

Setia Esra S Muham¹ Fivie Safitri² Agrifa Ido Arta Manalu³ Diraningsih Zai⁴ Indah Cofifah S M⁵ Rosmaida Sinaga⁶

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: setiaesramuham@gmail.com¹ fiviesafitri.3233121056@mhs.unimed.ac.id² agrifa.3233121061@mhs.unimed.ac.id³ 21004.3232421004@mhs.unimed.ac.id⁴ bocilabsenz.3232421010@mhs.unimed.ac.id⁵ rosmaidasinaga@unimed.ac.id⁶

Abstrak

Artikel ini membahas pola mobilisasi dan pemanfaatan pemuda oleh kekuasaan dalam dua periode berbeda: masa pendudukan Jepang (1942–1945) dan era digital kontemporer. Pada masa Jepang, pemuda dimobilisasi melalui organisasi semi-militer seperti Seinendan dan Keibodan untuk mendukung kepentingan militer dan ideologi penjajah. Sementara di masa kini, pemuda dimanfaatkan secara digital melalui peran sebagai buzzer politik yang menyebarkan narasi kekuasaan di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis dengan metode kualitatif, mengandalkan studi pustaka dari sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan adanya pola kontinuitas dalam strategi kekuasaan yang menjadikan pemuda sebagai alat hegemoni, baik secara fisik maupun digital. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut juga melahirkan kesadaran politik yang dapat mendorong pemuda menjadi subjek perubahan sosial. Artikel ini menekankan pentingnya literasi digital dan kesadaran kritis agar pemuda tidak terjebak dalam manipulasi kekuasaan, melainkan mampu tampil sebagai aktor utama dalam demokrasi yang reflektif dan partisipatif.

Kata Kunci: Pemuda, Kekuasaan, Buzzer Politik, Pendudukan Jepang

Abstract

This article discusses the patterns of mobilization and utilization of youth by the authorities in two different periods: the Japanese occupation (1942–1945) and the contemporary digital era. During the Japanese occupation, the youth were mobilized through semi-military organizations such as Seinendan and Keibodan to support the military interests and ideology of the colonizers. Meanwhile, in the present day, the youth are digitally utilized through their roles as political buzzers who spread power narratives on social media. This research uses a historical-critical approach with qualitative methods, relying on literature studies from primary and secondary sources. The study's findings indicate a pattern of continuity in power strategies that use youth as tools of hegemony, both physically and digitally. Nevertheless, this involvement also fosters political awareness that can encourage young people to become subjects of social change. This article emphasizes the importance of digital literacy and critical awareness so that young people do not get trapped in power manipulation, but instead can emerge as key actors in a reflective and participatory democracy.

Keywords: Youth, Power, Political Buzzers, Japanese Occupation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemuda selalu memainkan peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai kelompok usia produktif, pemuda memiliki energi, semangat perubahan, dan kapasitas intelektual yang menjadi kekuatan strategis dalam proses sosial, politik, dan budaya. Sejak era pergerakan nasional hingga masa kemerdekaan, pemuda kerap menjadi lokomotif perubahan sosial dan agen perjuangan kemerdekaan. Namun, di sisi lain, potensi besar ini juga tidak luput dari perhatian penguasa yang melihat pemuda sebagai sumber daya yang dapat dimobilisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Salah satu periode yang paling mencolok

dalam sejarah pemanfaatan pemuda oleh kekuasaan adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945). Pemerintah militer Jepang membentuk berbagai organisasi seperti Seinendan, Keibodan, PETA, dan Heiho sebagai sarana mobilisasi pemuda demi mendukung kepentingan militer dan politik dalam Perang Asia Timur Raya. Organisasi-organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan fisik dan mental, tetapi juga menjadi alat propaganda dan kontrol ideologis. Fenomena mobilisasi pemuda tidak berhenti pada masa penjajahan Jepang. Di era kontemporer, bentuk keterlibatan pemuda mengalami transformasi mengikuti perkembangan teknologi dan media digital. Kini, keterlibatan pemuda dalam ranah politik dan kekuasaan banyak terjadi melalui media sosial, salah satunya dalam peran sebagai buzzer politik. Peran ini sering kali tidak merepresentasikan kesadaran kritis atau idealisme politik, tetapi lebih sebagai bagian dari industri politik digital yang dikendalikan oleh kepentingan elite. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pola keterlibatan pemuda dalam kekuasaan berkembang dari masa pendudukan Jepang hingga era milenial saat ini. Dengan menggunakan pendekatan historis-kritis, artikel ini menyoroiti bagaimana kekuasaan memanfaatkan peran pemuda secara struktural dan ideologis dari masa ke masa. Penelitian ini juga hendak menunjukkan pentingnya kesadaran politik dan literasi digital bagi generasi muda agar mereka dapat memainkan peran sebagai subjek perubahan, bukan sekadar objek kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode historis dalam pendekatan sumber secara kualitatif dan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder, seperti dokumen, manuskrip dan kutipan sejarah yang memuat pembahasan sesuai dengan topik pembahasan dalam penulisan artikel ini. Sumber sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan publikasi ilmiah (Sugiyono, 2015). Pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan studi pustaka untuk memahami topik dan analisis dokumen sejarah untuk memperdalam wawasan terhadap topik pembahasan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis historis, melibatkan kritik sumber, evaluasi dan relevansi sumber untuk memastikan validitas data yang ada. Interpretasi data dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Keterlibatan Pemuda dalam Organisasi Bentukan Jepang Seinendan dan Keibodan Selama Masa Kedudukan Jepang di Indonesia

Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945), otoritas militer Jepang membentuk berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk yang secara khusus menyasar kalangan pemuda. Tujuan utama dari pembentukan organisasi-organisasi ini adalah untuk mengendalikan dan menggerakkan rakyat Indonesia demi mendukung kepentingan militer Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Di antara organisasi-organisasi tersebut, Seinendan (Barisan Pemuda) dan Keibodan (Barisan Pembantu Polisi) menjadi dua wadah utama yang secara langsung melibatkan para pemuda Indonesia. Seiring perkembangan Perang Pasifik, kekuatan Sekutu semakin mendominasi, sedangkan kedudukan Jepang mulai terdesak. Kekalahan mereka dalam pertempuran di Midway dan Kepulauan Solomon menandai perubahan strategi Jepang menjadi lebih defensif (Sudiyo, 1997). Dalam situasi ini, Indonesia menjadi kawasan strategis yang sangat penting bagi Jepang. Akibatnya, keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, semakin dibutuhkan. Pemerintah Jepang pun mulai mengadakan pelatihan militer dan mendirikan Seinen Dojo (pusat pelatihan militer) untuk melatih para pemuda. Selanjutnya, pada 29 April 1943, Jepang secara resmi membentuk sejumlah organisasi paramiliter seperti Seinendan, Keibodan, dan Fujinkai (organisasi wanita). Para pemuda yang

tergabung dalam organisasi ini menjalani latihan militer dasar dengan menggunakan senjata tiruan berbahan kayu serta menerima pendidikan kedisiplinan dan doktrin loyalitas kepada Jepang. Di sisi lain, kaum perempuan juga dimobilisasi untuk memberikan dukungan penuh terhadap Perang Asia Timur Raya (Sudiyo, 1997).



Gambar 1. Latihan Seinendan di Lapangan Ikatan Atletik Djakarta (Ikada) 1943
Sumber: Buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia

Seinendan adalah organisasi pemuda semi-militer yang dibentuk oleh Jepang untuk melibatkan pemuda berusia antara 14 hingga 25 tahun, meskipun kemudian batas usia ini disesuaikan menjadi 14 hingga 22 tahun. Organisasi ini memiliki jaringan hingga ke desa-desa besar, meskipun aktivitas terbesarnya berpusat di wilayah perkotaan. Para anggotanya dibekali pelatihan fisik dan mental sebagai kekuatan cadangan untuk menjaga ketertiban serta mempertahankan wilayah dari ancaman eksternal. Sementara itu, Keibodan dibentuk bagi pemuda berusia 23 hingga 35 tahun sebagai barisan pembantu kepolisian. Tugas utamanya mencakup pengaturan lalu lintas, pengamanan desa, penjagaan garis pantai dan wilayah udara, serta bantuan penanganan bencana. Organisasi ini berada di bawah pengawasan Keimubu (lembaga kepolisian Jepang) dan dikendalikan secara hierarkis oleh kepala polisi dari tingkat daerah hingga ke tingkat desa (Perdana, 2022). Di beberapa wilayah, Keibodan dikenal dengan nama Bogodan di Sumatera dan Borneo, serta Hokokudan di Kalimantan (Wulandari, 2024).

Meskipun secara resmi Keibodan dibentuk untuk menjaga ketertiban masyarakat, dalam praktiknya organisasi ini sering kali disalahgunakan untuk kepentingan politik militer Jepang. Seiring meningkatnya tekanan dari pasukan Sekutu, Keibodan mulai diarahkan menjadi alat intelijen yang memata-matai kegiatan sosial dan politik masyarakat. Banyak anggotanya direkrut sebagai informan, yang mengakibatkan terjadinya salah tangkap dan tuduhan tanpa dasar terhadap warga yang dicurigai anti-Jepang. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyingkirkan lawan politik mereka, sehingga Keibodan menjadi instrumen yang memecah belah masyarakat. Selain itu, Jepang juga memberlakukan kerja paksa terhadap rakyat jelata melalui sistem Romusha, yang melibatkan organisasi-organisasi semimiliter seperti Heiho, Seinendan, dan Keibodan. Para anggota organisasi ini dibekali pelatihan militer, penggunaan senjata, dan teknik-teknik peperangan (Wulandari, 2024). Di luar itu, Jepang juga membentuk Losyi Seinendan (organisasi cadangan bagi pemuda) dan Bakutai (pasukan berani mati), yang mencerminkan semakin meluasnya upaya mobilisasi masyarakat untuk mendukung keperluan perang. Menurut Ricklefs (2005), menjelang akhir masa perang, jumlah pemuda Indonesia yang tergabung dalam organisasi-organisasi semimiliter Jepang mencapai lebih dari dua juta orang, dengan sekitar 60% di antaranya terdaftar sebagai anggota Keibodan. Pada akhir tahun 1943, batas antara Keibodan dan Seinendan mulai tidak jelas karena keduanya menjalani pelatihan militer yang serupa dan

diarahkan pada tujuan pertahanan. Kendati demikian, Jepang tetap menjaga agar Keibodan tidak terpengaruh oleh kelompok nasionalis Indonesia, yang dianggap berpotensi menumbuhkan perlawanan terhadap kekuasaan Jepang.

Tujuan Politik Di Balik Mobilisasi Pemuda oleh Jepang

Setelah mengalahkan Belanda pada tahun 1942, Jepang membubarkan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dan menggantinya dengan sistem baru yang disesuaikan dengan kepentingan militer dan politik mereka. Meskipun mengklaim datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, kenyataannya Jepang menerapkan kontrol yang sangat ketat atas rakyat. Salah satu langkah penting untuk memperkuat dominasi ini adalah dengan memobilisasi pemuda Indonesia dalam berbagai organisasi dan kegiatan yang dikendalikan langsung oleh pemerintah militer Jepang (Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, 2008), (Koesoemadinata, 1995) Langkah paling mencolok dalam mobilisasi pemuda dilakukan melalui pembentukan PETA (Pembela Tanah Air), sebuah organisasi militer yang merekrut pemuda Indonesia untuk dilatih sebagai tentara pembantu Jepang. Tujuan utama pembentukan PETA bukanlah untuk membangun kekuatan militer Indonesia, melainkan sebagai alat politik Jepang untuk menanamkan loyalitas kepada kekuasaan mereka. Koesoemadinata (1995) menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan bertujuan memastikan para pemuda siap mendukung kepentingan militer Jepang, bukan untuk membela bangsa sendiri.

Selain PETA, Jepang juga menerapkan wajib militer bagi pemuda Indonesia melalui pembentukan Heiho, dan melibatkan perempuan muda dalam peran militer non-tempur seperti menjadi perawat dan pekerja pabrik amunisi (Anderson, 2005). Strategi ini memperlihatkan bahwa pemuda Indonesia dijadikan bagian dari upaya besar Jepang dalam mendukung Perang Asia Timur Raya. Mobilisasi pemuda yang dilakukan Jepang bukan sekadar kebutuhan logistik atau militer, melainkan bagian dari strategi politik yang bertujuan mengontrol kelompok usia produktif yang dianggap paling potensial untuk menentang kekuasaan asing. Jepang berharap, dengan melibatkan pemuda dalam kegiatan militer dan organisasi sosial, semangat perlawanan mereka bisa ditekan dan diarahkan sesuai kepentingan imperialis Jepang. Melalui pendekatan ini, Jepang berupaya membangun kesan bahwa mereka mempercayai pemuda Indonesia dan memberi mereka peran penting. Namun menurut Poesponegoro dan Notosusanto (1996), hal tersebut hanyalah upaya manipulatif, karena organisasi-organisasi itu diberi ruang gerak terbatas dan tetap dikendalikan secara ketat untuk mendukung kekuasaan Jepang, bukan untuk mendorong kemerdekaan Indonesia.

Selain organisasi militer, Jepang juga membentuk berbagai organisasi sosial-politik yang ditujukan kepada pemuda dan masyarakat umum, seperti Keimin Bunka Shidosho, Jawa Hokokai, dan Fujinkai. Organisasi-organisasi ini dijadikan saluran propaganda untuk menyebarkan semangat Asia Timur Raya serta menciptakan persepsi bahwa Jepang adalah pembebas dari kolonialisme Barat (Ricklefs, 1991). Melalui organisasi ini pula, Jepang menyebarkan ideologi dan mendisiplinkan masyarakat, khususnya pemuda, agar tunduk pada kepemimpinan Jepang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan perang, Jepang juga mengeksploitasi tenaga pemuda secara besar-besaran. Jutaan orang Indonesia, termasuk pemuda, dipaksa menjadi romusha, yaitu pekerja paksa untuk proyek-proyek militer Jepang. Selain itu, perempuan muda juga dipaksa menjadi "comfort women", yang dijadikan budak seks bagi tentara Jepang (Daradjati, 2023). Praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa mobilisasi pemuda bukan hanya bersifat simbolik atau ideologis, tetapi juga eksploitasi fisik yang brutal. Jepang juga melakukan reorganisasi pemerintahan dengan sistem yang sangat terpusat dan otoriter. Pejabat-pejabat lokal ditunjuk langsung oleh Jepang dan hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dari pusat (Liem, 2001). Selain itu, Jepang membentuk tonarigumi,

kelompok masyarakat kecil yang digunakan untuk mengawasi dan mengontrol kehidupan rakyat sehari-hari (Dardjowidjojo, 1999). Dalam konteks ini, pemuda tidak diberi ruang untuk berpolitik secara mandiri, melainkan diarahkan secara sistematis agar menjadi alat pengendalian sosial.

Jepang secara sistematis menutup organisasi-organisasi politik yang tidak mendukung mereka dan hanya mengizinkan kelompok yang loyal untuk beroperasi. Hal ini menyebabkan banyak pemimpin nasionalis, termasuk dari kalangan pemuda, terpaksa menyembunyikan aktivitasnya atau bekerja sama demi tetap bertahan (Poesponegoro, 2003). Tindakan ini memunculkan ketegangan dan memperkuat semangat perjuangan kemerdekaan, terutama ketika Jepang mulai melemah menjelang akhir pendudukannya. Mobilisasi pemuda Indonesia selama pendudukan Jepang merupakan bagian dari strategi politik yang kompleks. Di balik narasi pembebasan dan pemberdayaan, Jepang sebenarnya menggunakan pemuda sebagai alat untuk memperkuat kontrol politik dan militer mereka. Melalui organisasi militer dan sosial, serta eksploitasi fisik dan ideologis, Jepang berusaha membentuk generasi muda yang patuh dan tunduk terhadap kekuasaan mereka. Namun, kebijakan represif dan manipulatif ini justru mendorong kebangkitan kesadaran nasional, yang kelak menjadi pendorong penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pola Keterlibatan Pemuda Dalam Arena Kekuasaan/Rezim Saat Ini, Terutama di Bidang Politik dan Media Digital

Di era digital saat ini, keterlibatan pemuda dalam arena kekuasaan tidak lagi terbatas pada ruang-ruang formal seperti partai politik atau organisasi kepemudaan, melainkan telah meluas ke wilayah media sosial yang menjadi medan kontestasi politik baru. Pemuda kini menjadi aktor penting dalam penyebaran narasi politik, baik secara sukarela maupun terorganisir dalam sistem kerja yang dikenal sebagai buzzer. Para buzzer ini memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik melalui konten digital seperti hashtag, meme, video, hingga narasi teks yang sengaja dikonstruksi untuk menciptakan persepsi tertentu terhadap tokoh atau kebijakan politik. Mereka (para buzzer atau pemuda yang terlibat dalam politik digital) bekerja sama langsung dengan para tokoh atau partai politik yang punya kekuasaan di atas. Di saat yang sama, mereka juga menjalin hubungan dengan sesama buzzer atau komunitas pengguna media sosial lain yang setara dengan mereka. Melalui dua arah kerja sama ini, mereka membentuk jaringan yang luas dan kuat di dunia maya. Jaringan ini sangat berpengaruh karena bisa mengubah cara pandang banyak orang, khususnya anak muda, terhadap isu-isu politik dan kekuasaan—misalnya, membuat mereka mendukung tokoh tertentu, percaya pada narasi tertentu, atau bahkan membenci kelompok lain tanpa sadar (Putra, 2023). Di sisi lain, pemerintah juga menggunakan buzzer sebagai alat hegemoni kekuasaan, seperti terlihat pada masa pemerintahan Joko Widodo, di mana buzzer dimobilisasi untuk menyebarkan narasi yang menstabilkan citra pemerintah serta menyerang pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap kebijakan negara. Melalui pendekatan teori hegemoni Antonio Gramsci, penggunaan buzzer ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan publik secara halus, tidak melalui represi langsung, melainkan melalui kendali wacana dan narasi yang dilakukan oleh figur-figur muda di media digital (Abiyuyu, Darry, Nindyaswari, & Asri, 2022)

Meskipun anak muda sekarang sangat aktif di media sosial dan sering terlibat dalam kegiatan politik di sana, keterlibatan mereka tidak selalu menunjukkan partisipasi yang benar-benar mewakili semangat demokrasi, seperti menyuarakan pendapat secara bebas dan berpikir kritis. Sebaliknya, banyak dari mereka ikut terlibat karena alasan praktis, misalnya karena dibayar, diajak kerja sama dalam proyek kampanye, atau hanya ikut-ikutan tren. Jadi, keterlibatannya lebih karena kepentingan pribadi atau keuntungan tertentu, bukan karena

kesadaran politik atau dorongan untuk memperjuangkan perubahan sosial. Buzzer kini menjadi semacam profesi baru yang berbasis pesanan, dengan insentif ekonomi yang menggiurkan dan beroperasi di bawah sistem algoritma media sosial yang sengaja dirancang untuk menciptakan viralitas, bukan deliberasi (Putra, 2023). Kondisi ini membuat keterlibatan pemuda rentan dimanfaatkan oleh rezim kekuasaan untuk memperkuat dominasi ideologi melalui narasi yang telah direkayasa sebelumnya. Fenomena ini juga berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi digital, di mana ruang publik yang semestinya menjadi tempat dialog terbuka justru berubah menjadi arena polarisasi dan manipulasi. Dalam konteks ini, kehadiran buzzer tidak hanya mereduksi potensi kritis pemuda, tetapi juga meminggirkan suara-suara alternatif yang tidak sejalan dengan kepentingan dominan (Rahim N. S., 2024). Oleh karena itu, penting adanya pendekatan interdisipliner yang tidak hanya melihat fenomena ini dari sisi teknologi komunikasi, tetapi juga dari aspek politik, sosiologi kekuasaan, dan etika partisipasi publik. Saat ini, kekuasaan atau pemerintah tidak lagi hanya menggunakan lembaga resmi seperti partai politik, lembaga negara, atau aturan hukum untuk mempertahankan pengaruhnya. Mereka juga mengandalkan media digital seperti media sosial sebagai alat kekuasaan baru. Lewat media ini, mereka membentuk opini, menyebarkan narasi politik, dan mengajak anak muda ikut terlibat. Tapi, keterlibatan anak muda itu sering kali diarahkan dan dimanfaatkan bukan untuk membangun demokrasi, tapi untuk kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek, seperti kampanye pemilu (Miqdad, 2024). Jadi, media sosial menjadi semacam mesin politik digital, di mana peran pemuda bisa dikendalikan sesuai kepentingan mereka yang sedang berkuasa. Literasi digital dan kesadaran politik yang kuat menjadi kunci agar pemuda tidak hanya menjadi alat, tetapi juga pelaku utama dalam membentuk demokrasi yang substantif dan reflektif.

Pemuda dan Kekuasaan: Pola Pemanfaatan dari Masa Jepang ke Era Kini

Sejak dulu, pemuda selalu jadi bagian penting dalam perjalanan politik Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), pemuda dijadikan alat untuk mendukung kepentingan militer dan politik penjajah. Tapi nyatanya, pola seperti ini tidak berhenti di sana. Di zaman sekarang, pemuda tetap dimanfaatkan—bedanya bukan lagi lewat senjata atau barisan pelatihan fisik, melainkan lewat media sosial, buzzer, dan opini publik yang bisa digiring lewat algoritma. Artikel ini mencoba membandingkan bagaimana pemuda dimobilisasi oleh penguasa di dua masa yang berbeda: masa Jepang dan masa digital sekarang.

Pemuda di Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Jepang tahu bahwa pemuda Indonesia punya potensi besar untuk dimanfaatkan. Karena itu, mereka membentuk organisasi seperti Seinendan (barisan semi-militer usia 14–25 tahun), Keibodan (korps keamanan usia 25–35 tahun), Heiho (pasukan pembantu), dan PETA (tentara sukarela Indonesia). Selain itu, ada juga organisasi sosial-politik seperti Putera dan Jawa Hokokai. Semua organisasi ini berada di bawah pengawasan ketat militer Jepang. Pemuda dilatih baris-berbaris, gotong royong, belajar bahasa Jepang, dan bahkan ikut kegiatan keamanan. Meskipun disebut "sukarela", kenyataannya mereka dipilih dan diwajibkan ikut tanpa bayaran. Bahkan Keibodan diberi kekuasaan seperti polisi kecil: menggeledah barang, menjaga pos desa, dan mengatur warga. Hal ini menimbulkan rasa takut dan ketegangan di banyak tempat (Gunawan, 2008). Jepang juga memanfaatkan pemuda untuk propaganda. Lewat Barisan Pelopor, Hizbullah, dan kegiatan Hokokai, pemuda diarahkan untuk patuh dan loyal pada kekuasaan kolonial. Banyak dari mereka akhirnya punya pengalaman militer yang kelak berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Tapi yang jelas, saat itu, pemuda adalah alat penguasa.

Pemuda di Era Sekarang

Jika dulu pemuda digiring ke lapangan, sekarang mereka bertempur di dunia maya. Istilahnya buzzer politik-pemuda yang punya tugas menyebarkan narasi, mengatur opini publik, dan kadang menyebarkan disinformasi lewat media sosial seperti Twitter atau TikTok (Maulana & Hastuti, 2022) Buzzer bukan sekadar akun anonim. Mereka tergabung dalam jaringan yang terhubung ke elit politik dan kelompok digital. Tugasnya jelas: buat opini, viralkan tagar, serang lawan politik, dan promosikan tokoh tertentu. Pola ini mirip seperti Keibodan di masa Jepang, hanya saja sekarang bentuknya digital (Rahim S., Nuur, & dkk, 2024). Contohnya, di masa pemerintahan Jokowi, buzzer digunakan untuk membangun citra positif presiden, membela kebijakan pembangunan, dan menyerang pengkritik. Narasi seperti "Jokowi orang baik" atau "kritik itu hanya karena benci" menyebar luas, sebagai bentuk kontrol opini masyarakat. Dalam teori Gramsci, ini disebut hegemoni—di mana penguasa menguasai cara berpikir rakyat (Abiyuyu, Darry, Nindyaswari, & Asri, 2022). Yang berubah hanyalah cara dan alatnya. Dulu, pemuda dikumpulkan dalam organisasi dan dilatih secara fisik. Sekarang, mereka dikumpulkan lewat jaringan digital, dilatih secara informal lewat algoritma dan tren. Tapi fungsinya tetap: mengendalikan opini publik demi stabilitas politik. Buzzer saat ini bisa dibidang prajurit maya yang setia pada pemilik modal atau kekuasaan. Mereka mendapat imbalan berupa status, pengaruh, atau bahkan jabatan. Ini bukti bahwa pemuda masih terus dipakai, bukan sebagai kekuatan kritis, tapi sebagai alat kekuasaan. Ada pola yang berulang dalam sejarah politik Indonesia: pemuda selalu dijadikan pion dalam strategi kekuasaan. Dulu lewat latihan fisik dan barisan pemuda, sekarang lewat konten, tagar, dan algoritma. Ini menjadi peringatan bahwa pemuda perlu sadar akan perannya. Mereka bisa jadi agen perubahan yang mandiri, atau hanya jadi alat propaganda jika tak waspada. Pemuda harus mampu membebaskan diri dari jeratan kontrol kekuasaan, dan berdiri sebagai kekuatan rakyat yang kritis dan berani bersuara.

Dampak dari Pemanfaatan Peran Pemuda oleh Kekuasaan, Baik pada Masa Pendudukan Jepang Maupun Masa Kini

Pemuda selalu diharapkan menjadi pilar dalam kemajuan bangsa. Namun, peran penting ini seringkali menjadi target penyalahgunaan kekuasaan. Catatan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pemuda telah dimanfaatkan secara terencana oleh pemerintahan yang berkuasa, terutama selama masa pendudukan Jepang. Di zaman sekarang, pemuda tetap memiliki peranan krusial, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. (Sinaga, Rumahorbo, Nduru, & Pakpahan, 2024)

Pemuda di Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Selama periode penjajahan Jepang, pemuda Indonesia dikerahkan melalui sejumlah organisasi, termasuk Seinendan (barisan pemuda), Keibodan (barisan yang membantu kepolisian), dan Heiho (pasukan yang mendukung tentara Jepang). Jepang memanfaatkan kekuatan fisik serta semangat pemuda demi kepentingan militer dan penyebaran ideologi imperialisme. Selain itu, sistem pendidikan yang diterapkan oleh Jepang cenderung bersifat doktriner dan difokuskan pada kesetiaan kepada Kaisar, serta mengabaikan perkembangan pemikiran kritis dan intelektual. Kebijakan untuk menarik tenaga kerja telah merusak tatanan sosial dan perekonomian masyarakat. Banyak pemuda dipaksa untuk meninggalkan keluarga mereka demi kerja paksa, yang mengakibatkan trauma kolektif dan rasa benci terhadap kekuasaan kolonial. Program kerja paksa, seperti Romusha, juga menjadi lambang dari eksploitasi yang kejam terhadap generasi muda pada saat itu. (Tambunan, Sinaga, Aziz, & Sinaga, 2024) Pelatihan militer dan disiplin yang diperoleh oleh generasi muda dalam organisasi yang diciptakan oleh Jepang ternyata menjadi aset penting dalam pergerakan untuk

meraih kemerdekaan. Pengalaman ini mendorong munculnya kesadaran politik, semangat nasionalisme, serta keterampilan militer yang pada akhirnya digunakan dalam revolusi fisik setelah tahun 1945. Dalam hal ini, generasi muda beralih dari menjadi objek kekuasaan ke dalam peran sebagai subjek perubahan sosial dan politik. Jepang juga memberikan izin untuk mendirikan beberapa organisasi semi-independen seperti PETA, yang melahirkan banyak tokoh militer terkenal dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu, meskipun awalnya berfungsi sebagai alat koloni, kontribusi generasi muda dalam struktur kekuasaan Jepang justru berperan sebagai penggerak dalam pembentukan identitas bangsa dan semangat untuk merdeka.. (Sinaga, Rumahorbo, Nduru, & Pakpahan, 2024)

Relevansi dan Peran Pemuda di Era Kontemporer

Di era saat ini, para pemuda masih menjadi objek dan alat dalam agenda kekuasaan, tetapi dengan cara yang lebih halus dan fokus pada perkembangan. Mereka dianggap sebagai penggerak perubahan dalam meningkatkan ketahanan daerah melalui pendidikan tentang anti-korupsi, keterlibatan dalam lembaga pengawasan, dan ikut serta dalam kebijakan publik. Inisiatif seperti Indonesia Corruption Watch serta partisipasi dalam berbagai forum demokrasi menandakan peran aktif yang dimainkan oleh pemuda dalam mendorong pengelolaan pemerintahan yang transparan. (Alfaqi, Habibi, & Rapita, 2017) Namun, tantangan signifikan muncul akibat pengaruh globalisasi dan digitalisasi, di mana generasi muda mengalami krisis identitas dan sikap tidak peduli yang dapat dimanfaatkan oleh elit politik untuk mobilisasi massa tanpa memiliki kesadaran kritis. Kampanye politik melalui media sosial sering kali menargetkan generasi muda, dengan memanfaatkan isu-isu sensasional untuk menarik simpati dan dukungan, sering kali tanpa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai masalah kebangsaan. Kemajuan teknologi juga membuka peluang besar bagi generasi muda untuk memberikan kontribusi di berbagai sektor, seperti pendidikan, kewirausahaan, lingkungan, dan pembelaan hak asasi manusia. Munculnya sejumlah komunitas kreatif, perusahaan rintisan digital, dan gerakan sosial membuktikan bahwa generasi muda dapat berperan sebagai penggerak perubahan yang mandiri dan inovatif.. (Januarharyono, 2019)

Pemuda juga dapat terjebak dalam lingkaran kekuasaan yang manipulatif, seperti terlibat dalam politik tanpa tujuan ideologis yang jelas, atau menjadi bagian dari pemisahan sosial yang berlandaskan identitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pemuda pemahaman politik, etika publik, dan kemampuan berpikir kritis agar mereka dapat berperan sebagai agen perubahan yang transformatif dan tidak dengan mudah dimanfaatkan oleh kekuasaan. Penggunaan peran pemuda oleh kekuasaan adalah sebuah fenomena yang telah berulang dalam sejarah Indonesia. Pada era penjajahan Jepang, pemuda diorganisir secara militansi dan ideologis, namun pengalaman itu juga memicu lahirnya semangat nasionalisme dan kesadaran politik. Saat ini, pemuda ditempatkan sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan, tetapi masih memiliki risiko untuk dieksploitasi secara ideologis dan politik dalam kerangka demokrasi pemilihan dan ekonomi digital. (Sihombing, Sianturi, & Oktavia, 2024)

KESIMPULAN

Mobilisasi dan pemanfaatan pemuda oleh kekuasaan merupakan fenomena yang terus berulang dari masa ke masa dalam sejarah Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), pemuda Indonesia dilibatkan secara sistematis dalam organisasi semi-militer seperti Seinendan, Keibodan, Heiho, dan PETA. Keterlibatan ini bukanlah bentuk pemberdayaan, melainkan strategi penjajah untuk menanamkan loyalitas dan mengendalikan potensi perlawanan dari kelompok usia produktif. Meskipun demikian, pengalaman militer dan kedisiplinan yang diperoleh justru menjadi bekal penting bagi pemuda dalam perjuangan

kemerdekaan pasca-kekalahannya Jepang. Di era kontemporer, pola pemanfaatan pemuda oleh kekuasaan berubah bentuk namun memiliki esensi yang sama. Pemuda kini dimobilisasi melalui media digital dan media sosial dalam bentuk buzzer politik, yang menyebarkan narasi kekuasaan dan membentuk opini publik. Aktivitas ini seringkali dilandasi motif ekonomi dan politis, bukan kesadaran kritis. Pemerintah dan elite politik memanfaatkan kekuatan digital pemuda untuk menciptakan stabilitas narasi yang menguntungkan mereka, dengan cara yang halus namun manipulatif melalui hegemoni kultural dan algoritma. Oleh karena itu, terdapat pola kontinuitas dalam sejarah politik Indonesia di mana pemuda kerap dijadikan alat kekuasaan, baik secara fisik maupun digital. Hal ini menjadi tantangan besar bagi generasi muda untuk menyadari posisi strategis mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda harus mampu melepaskan diri dari peran sebagai objek kekuasaan, dan tampil sebagai subjek yang kritis, reflektif, dan transformatif dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyuyu, M., Darry, Nindyaswari, D., & Asri. (2022). Penggunaan Buzzer dalam Hegemoni Pemerintahan Joko Widodo. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 70-81.
- Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., & Rapita, D. D. (2017). Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- Anderson, B. R. (2005). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso Books.
- Daradjati, K. P. (2023). Bersiasat Melawan Saudara Tua: Mobilisasi dan Resistensi Perempuan Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang. *Lembaran Sejarah*, 19(1), 38-57.
- Dardjowidjojo, S. (1999). "Administrasi Jepang di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial . Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 20-30.
- Gunawan, A. (2008). Kebijakan Pemerintah Militer Jepang Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) Khususnya di Pulau Jawa. *Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin*.
- Januarharyono, Y. (2019). Peran Pemuda di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*.
- Koesoemadinata, S. (1995). Peta Sejarah Indonesia. *Jurnal Sejarah*, 1(1), 1-15.
- Liem, L. M. (2001). *Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Maulana, F. H., & Hastuti. (2022). Peran Buzzer Politik Dalam Pembentukan Opini Publik Mendukung Anies Baswedan di Media Sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 111-122.
- Miqdad. (2024). Literature Review: Buzzer Politik dan Pengembangan Opini di Media Sosial di Indonesia. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5. No. 2 hlm 689-698.
- Perdana, Y., & Pratama, R. A. (2022). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Poesponegoro, M. D. (2003). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Kompas.
- Putra, A. (2023). Peran Buzzer Politik Dalam Dinamika Jelang Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 10 No. 4 Pp.1143-1158.
- Rahim, N. S. (2024). The Role Of Buzzers On Social Media In Shaping Public Policy Opinion During The 2024 Election . *PubBis Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No. 2 hlm 147-158 DOI 10.35722/jurnalpubbis.v8i2.1051.
- Rahim, S., Nuur, & dkk. (2024). Role of Buzzers on Social Media in Shaping Public Policy Opinion During the 2024 Election. *Jurnal PubBis*, 147-151.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu.



- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Sihombing, M., Sianturi, L. Y., & Oktavia, N. W. (2024). Peran Politik di Indonesia Selama Masa Pendudukan Jepang. *Jurnal Akuntansi hukum dan Edukasi*.
- Sinaga, R., Rumahorbo, R. D., Nduru, S., & Pakpahan, G. (2024). Dampak Pendudukan Jepang Terhadap Kebangkitan Nasionalisme Indonesia. *Journal of Education and Learning Evaluation*.
- Sudiyo, D. D. (1997). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Museum Kebangkitan Nasional.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 1st ed: Alfabeta.
- Tambunan, R. J., Sinaga, T. D., Aziz, L., & Sinaga, R. (2024). Dampak Pengerahan Tenaga Rakyat Pada Masa Pendudukan Jepang. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 71-77.
- Wulandari, A. N., & dkk. (2024). Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (3) 16869-16880.